BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024;
b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembanguna daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah meliputi ketidaksesuaian saldo anggaran lebih tahun anggaran tahun sebelumnya, pergeseran pagu sub kegiatan antar Perangkat Daerah, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu sub kegiatan, penambahan rencana pendapatan dalam perubahan dan kebutuhan akan adanya tambahan sub kegiatan pada Perangkat Daerah serta adanya perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan Tahun 2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6867);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun

2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);

13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 47), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

No.	JABATAN	PARAF
1.	Pj Sekda	
2.	Asisten Ekbang	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka. Bappeda Litbang	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 15 JUL 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 15 JULI 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024 NOMOR 16.

BAB VI
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka penyesuaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024 termasuk terhadap keuangan daerah, sehingga dilakukan penyesuaian pada RKPD Tahun 2024 sebagai dokumen rencana pembangunan daerah yang digunakan sebagai dasar proses penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi, terutama pada fokus prioritas daerah, fokus program dan kegiatan dan sub kegiatan, serta target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dokumen perubahan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024 antara lain memuat perubahan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta perubahan rencana program dan kegiatan berikut pendanaannya. Dokumen Perubahan RKPD ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024. Selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Implementasi program pembangunan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2024 akan tercapai apabila didukung komitmen semua pihak. Semoga melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024 mampu mendorong terwujudnya cita-cita pembangunan Kabupaten Banyumas.

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asekbang	
3	Kabag Hukum	
4.	Ka. Bappeda Litbang	

REVIU REGISTER RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN STRATEGIS
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

Nama Pemda	:	Pemerintah Kabupaten Banyumas	
Tahun Penilaian	:	2024	
Periode yang Dinilai	:	Tahun 2024	
Sumber Data	:	RPD Tahun 2024-2026	
Tujuan Strategis RPD	:	Tujuan 1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih Efektif dan Berdaya Saing
		Tujuan 2	Menangani kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kualitas SDM
		Tujuan 3	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
		Tujuan 4	Memperkuat Ketahanan Pangan

NO	Tujuan/ Sasaran	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		Rencana Tindak Pergendalian	SKPD	KETERANGAN
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih Efektif dan Berdaya Saing**													
1	Mewujudkan ASN yang Profesional	1	Nilai Sistem Merit	Penerapan kebijakan sistem merit belum optimal		Kepala Daerah	Belum terdapat sistem pelaksanaan penerapan yang memadai	Internal	C	Penempatan dan pola karir ASN belum tepat berdasarkan kompetensi, dan tujuan pemerintah daerah tidak tercapai	1. Kepala Daerah; 2. ASN Pemda Banyumas; 3. Masyarakat; 4. Pihak terkait lainnya	1. Penyusunan sistem yang mendukung penerapan pelaksanaan sistem merit di Kabupaten Banyumas, 2. Penyusunan kebijakan internal tentang pedoman coaching dan mentoring	PEMKAB BANYUMAS	Penambahan Indikator PK beserta risiko dan Rencana Tindak Pengendalian
		2	Indeks Profesionalitas ASN	Sistem Manajemen Kinerja ASN belum diimplementasikan sesuai ketentuan		Kepala Daerah	Belum adanya kebijakan terkait Sistem Manajemen Kinerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas baik terkait Pengelolaan ASN maupun pengembangan ASN	Internal	C	Belum optimalnya pencapaian kinerja organisasi yang efektif dan efisien, kurang profesionalnya birokrasi pelayanan, dan menghambatnya pencapaian perencanaan pembangunan daerah yang strategis	1. Kepala Daerah 2. OPD terkait 3. Masyarakat	Penyusunan kebijakan terkait Sistem Manajemen Kinerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas baik terkait Pengelolaan ASN maupun pengembangan ASN	PEMKAB BANYUMAS	Tetap
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik IPKP	Kurangsinerginya Pelayanan Publik Lintas Perangkat Daerah/Instansi Vertikal		Kepala Daerah	Kebijakan pelayanan publik belum sepenuhnya mengatur pelayanan lintas perangkat daerah/instansi vertikal	Internal	C	Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1. Kepala Daerah 2. OPD terkait 3. Masyarakat	Penyusunan Kebijakan pelayanan publik yang mengatur pelayanan lintas perangkat daerah/instansi vertikal	PEMKAB BANYUMAS	Penambahan indikator PK Indeks Pelayanan Publik dengan risiko dan RTP tetap
		4	Indeks Pelayanan Publik											
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Kolaboratif	5	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP	Belum optimalnya kualitas dan pemanfaatan perencanaan kinerja untuk pencapaian tujuan Pemkab		Kepala Daerah	Masih belum efektifnya Implemantasi Kebijakan Pemkab terkait Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja	Internal	C	Tidak tercapainya tujuan strategis pemda;	1. Kepala Daerah 2. OPD terkait 3. Masyarakat	Pemantauan Tindak lanjut Evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja	PEMKAB BANYUMAS	Penambahan risiko dan RTP baru
							Kurangnya pemahaman pimpinan perangkat daerah tentang kebijakan Akuntabilitas Perencanaan Kinerja	Internal	C	Tidak tercapainya tujuan Pemkab	1. Pemda 2. OPD terkait 3. Pemangku kepentingan terkait 4. Masyarakat			
							Kurangnya Partisipasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam pencapaian tujuan Pemkab	Eksternal	C	Tujuan tidak tercapai	1. Pemda 2. OPD terkait 3. Pemangku kepentingan terkait 4. Masyarakat			
				Kurangnya kualitas Pelaporan kinerja Pemkab		Kepala Daerah	Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelaporan kinerja Pemkab	Internal	C	Kurangnya kepercayaan pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap kinerja pemkab	1. Pemda 2. OPD terkait 3. Masyarakat	1. Menggunakan kerangka kerja yang mencakup semua aspek penting dari kinerja instansi dalam penyusunan LKjIP; 2. Mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan dalam penyusunan LKjIP untuk memastikan laporan mencerminkan perspektif dan kebutuhan dari pemangku kepentingan.	PEMKAB BANYUMAS	Penambahan risiko dan RTP baru
				Masih tingginya persepsi korupsi		Kepala Daerah	Kurangnya Keterbukaan dan Transparansi atas proses dan hasil evaluasi	Internal	C	Kurangnya kepercayaan pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap integritas pemkab	1. Pemda 2. OPD terkait 3. Masyarakat	1. Menetapkan kebijakan yang mendukung keterbukaan dalam proses evaluasi dan hasil yang diperoleh; 2. Menyampaikan hasil evaluasi kepada pemangku kepentingan secara terbuka dan transparan.	PEMKAB BANYUMAS	Penambahan risiko dan RTP baru
				Penguluran kinerja organisasi yang berdasarkan perencanaan kinerjabelum sepenuhnya menjadi dasar penentuan reward		Kepala Daerah	Kebijakan reward dan punishmen belum sepenuhnya mendasari pada perencanaan dan pengukuran kinerja	Internal	C	Profesionalitas ASN rendah dalam mendukung pecapaian tujuan Pemkab	1. Pemda 2. OPD terkait 3. Masyarakat	1. Mengembangkan dan menerapkan standar yang konsisten dalam pengukuran kinerja; 2. Mengadakan pelatihan yang memadai untuk memahami dan menerapkan metode pengukuran kinerja yang konsisten.	PEMKAB BANYUMAS	Penambahan risiko dan RTP baru

NO	Tujuan/ Sasaran	No	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab			Dampak		Rencana Tindak Pengendalian	SKPD	KETERANGAN
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
		6	Nilai Komponen Hasil Indek Reformasi Birokrasi	Belum membudayanya kinerja untuk mendukung implementasi Reformasi Birokrasi		Kepala Daerah	Kurangnya komitmen dan pemahaman semua Pimpinan OPD untuk mengimplementasikan kebijakan Reformasi Birokrasi	Internal	C	Menurunnya kinerja Reformasi Birokrasi	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat	Penandatanganan Komitmen Kepala OPD untuk menerapkan Reformasi Birokrasi	PEMKAB BANYUMAS	Tetap
		7	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP	Kebijaan yang ada belum efektif dalam pengendalian intern penyelenggaraan pemerntahan dan pencapaian tujuan Pemkab		Kepala Daerah	Belum optimalnya komitmen pimpinan untuk mendorong implementasi kebijakan SPIP sampai dengan level perangkat daerah	Internal	C	Tidak tercapainya tujuan organisasi	1. Pemda 2. OPD terkait 3. Masyarakat	Peningkatan sosialisasi kepada Kepala Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan Perbup Nomor 49 Tahun 2023	PEMKAB BANYUMAS	Tetap
		8	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE	Kurangnya Penerapan Manajemen Risiko SPBE		Kepala Daerah	Belum adanya kebijakan terkait pedoman manajemen risiko SPBE yang terarah dan terencana	Internal	C	Munculnya permasalahan berupa risiko negatif yang tidak teridentifikasi dengan baik sehingga menghambat pencapaian tujuan	1. Pemda 2. OPD terkait 3. Masyarakat	Penyusunan kebijakan terkait pedoman manajemen risiko SPBE yang terarah dan terencana	PEMKAB BANYUMAS	Tetap
				Rencana TIK (SPBE) serta Inovasi Probis SPBE belum dapat dilaksanakan pada fungsi Pemkab		Kepala Daerah	Belum memiliki kebijakan internal pengawasan dan evaluasi periodik SPBE yang standar	Internal	C	Sistem informasi belum efektif memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pemerintahan	1. Pemda 2. OPD terkait 3. Masyarakat	Penyusunan kebijakan internal pengawasan dan evaluasi periodik SPBE yang standar	PEMKAB BANYUMAS	Tetap
		9	Capaian Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah	Belum efisiennya pengelolaan keuangan daerah untuk pembiayaan pelaksanaan pembangunan		Kepala Daerah	Belum efektifnya implementasi kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah	Internal	C	Menurunnya akuntabilitas laporan keuangan daerah	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat	Pemantauan intensif terhadap pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sesuai ketentuan kebijakan	PEMKAB BANYUMAS	Tetap
				Masih lemahnya tingkat kemandirian fiskal daerah		Kepala Daerah	Belum optimalnya implementasi kebijakan peningkatan pendapatan daerah	Internal	C	Pembangunan tidak terealisasi sesuai perencanaan	1. Pemda 2. OPD terkait 3. Masyarakat	Penyusunan kebijakan yang mengatur kontribusi PAD terhadapAPBD	PEMKAB BANYUMAS	Tetap
		10	Indeks Reformasi Hukum	Peraturan di tingkat daerah tidak sinergi dengan peraturan pusat		Kepala Daerah	Peraturan di tingkat daerah tidak sinergi dengan peraturan pusat	Internal	C	Temuan pelanggaran karena peraturan di tingkat daerah tidak sesuai dengan peraturan di atasnya	1. Sekretariat Daerah; 2. OPD terkait	Koordinasi intensif dengan instansi vertikal terkait sinergitas peraturan di tingkat pusat dan daerah	PEMKAB BANYUMAS	Penambahan Indikator PK beserta risiko dan RTP baru
				Pelaksanaan tata kelola pemerintahan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku		Kepala Daerah	Peraturan di tingkat daerah tidak sinergi sesuai dengan peraturan di atasnya	Internal	C	Temuan ketidaktaatan hukum dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahaan	OPD Pelaksana	Sosialisasi peraturan terlait di tingkat kabupaten dan perangkat daerah masing-masing	PEMKAB BANYUMAS	
		11	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Kurang sesuainya biaya dan kualitas pengalaan dengan dengan kebutuhan		Kepala Daerah	Pejabat pengadaan tidak andal dalam penentuan kebutuhan pengadaan barang dan jasa	Internal	C	Barang dan jasa yang diadakan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kinerja	1. BKAD, 2. Sekretariat OPD	Perencanaan, mengawasan, dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	PEMKAB BANYUMAS	Penambahan Indikator PK beserta risiko dan RTP baru
						Kepala Daerah	Pihak ketiga tidak akuntabel dalam pelaksanaan pengadaan	Eksternal	C	Inefisiensi anggaran	OPD			
2	**Menangani kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kualitas SDM**													
4	Meningkatkan kesempatan kerja	12	Tingkat Kesempatan Kerja	Kurangnya minat dan kemampuan masyarakat untuk berusaha secara mandiri		Kepala Daerah	belum optimalnya implementasi kebijakan pengembangan usaha	Internal	C	Meningkatnya pengangguran	1. Kepala Daerah 2. OPD terkait 3. Masyarakat	Penguatan inkubator bisnis	PEMKAB BANYUMAS	Tetap
				Masih terbatasnya lapangan kerja untuk menyerap tenaga kerja yang tersedia		Kepala Daerah	Kurangnya kerjasama dengan dunia usaha dalam penjaringan tenaga kerja	Internal	C	Meningkatnya pengangguran	1. Kepala Daerah 2. OPD terkait 3. Masyarakat	Melakukan Mou kerjasama dengan perusahaan mitra kerja untuk perekrutan Tenaga Kerja	PEMKAB BANYUMAS	Tetap
5	Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja	13	Angkatan kerja yang bekerja dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan minimal SLTA	Banyaknya Lulusan sekolah menengah dan sarjana tanpa skill sesuai kebutuhan dunia usaha		Kepala Daerah	Belum adanya kebijakan yang mendorong pendidikan sekolah menengah dan sarjana memberikan pendidikan atau keahlian sesuai dengan kebutuhan dunia usaha	Internal	C	Meningkatnya pengangguran	1. Kepala Daerah 2. OPD terkait 3. Masyarakat	Melakukan Mou kerjasama dengan perusahaan mitra kerja untuk sertifikasi Tenaga Kerja	PEMKAB BANYUMAS	Tetap
6	Meningkatkan derajat pendidikan	14	Harapan Lama Sekolah	Banyaknya warga usia sekolah tidak sekolah		Kepala Daerah	Belum efektifnya kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong anak tidak sekolah untuk kembali ke sekolah	Internal	C	Rendahnya kualitas pendidikan dan SDM masyarakat Kabupaten Banyumas	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat	Penyusunan Surat Edaran kebijakan Pengembalian anak tidak sekolah pada masing-masing wilayah	PEMKAB BANYUMAS	Perubahan risiko dan RTP
7	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	15	Nilai Kota Layak Anak	Belum terpenuhinya hak-hak anak di Kabupaten Banyumas		Kepala Daerah	Belum tersusunnya RAD terkait Kabupaten Layak Anak	Internal	C	Belum optimalnya tumbuh kembang anak	1. Kepala Daerah 2. OPD terkait 3. Masyarakat	Penyusunan RAD terkait Kabupaten Layak Anak	PEMKAB BANYUMAS	Tetap
		16	Indek Pembangunan Gender IPG	Belum optimalnya implementasi kebijaan Pemberdayaan Perempuan		Kepala Daerah	Kurangnya sinergitas lintas sektoral untuk mendukung Program pemberdayaan perempuan dan Belum efektifnya kelembagaan PUG	Internal	C	Menurunnya daya saing perempuan	1. Kepala Daerah 2. OPD terkait 3. Masyarakat	Intensifikasi pemantauan dan pengawasan kebijakan PUG dan implementasinya dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pada perangkat daerah	PEMKAB BANYUMAS	Tetap
8	Meningkatkan DeraJat kesehatan masyarakat	17	Usia Harapan Hidup UHH	belum optimalnya standar kesehatan Keluarga khususnya kesehatan Ibu dan anak		Kepala Daerah	Belum sinerginya program lintas sektoral yang mendukung keluarga sehat khususnya kesehatan ibu dan anak	Internal	C	Menurunnya Kualitas kesehatan keluarga serta Tingginya AKI dan AKB	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat	Penyusunan kebijakan terkait upaya kesehatan ibu dan anakserta penanganan stunting	PEMKAB BANYUMAS	Tetap
				Masih rendahnya kualitas kesehatan ibu hamil dan balita dibawah 2 tahun		Kepala Daerah	Belum optimalnya implementasi kebijakan penanganan stunting	Internal	C	Masih tingginya prevalensi stunting	1. Pemda 2. OPD Terkait 3. Stake holder terkait 4. Masyarakat	Kebijakan intervensi intensif ibu hamil dan baduta berisiko tinggi	PEMKAB BANYUMAS	Tetap
9	Mengoptimalkan pengendalian pertumbuhan Penduduk	18	Laju Pertumbuhan Penduduk	Implenentasi program pengendalian penduduk belum efektif		Kepala Daerah	Belum adanya GDPK (Grand Design Pembangunan Kependudukan)	Internal	C	Laju pertumbuhan laju penduduk tidak terkendali	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat	Penyusunan GDPK (Grand Design Pembangunan Kependudukan)	PEMKAB BANYUMAS	Tetap
10	Meningkatnya kapabilitas dan daya saing Pemuda	19	Tingkat Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Belum sinerginya pembangunan pemuda		Kepala Daerah	Belum adanya RAD Pelayanan Kepemudaan	Internal	C	Kurangnya kapabilitas dan daya saing pemuda	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat	Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan	PEMKAB BANYUMAS	Tetap
11	Meningkatkan Literasi Masyarakat	20	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat IPLM	Kurangnya minat baca yang edukatif pada masyarakat		Kepala Daerah	Belum adanya kebijakan yang mendorong budaya literasi masyarakat	Internal	C	Menurunnya daya saing anak	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat	Penyusunan kebijakan yang mendorong pemanfaatan penggunaan gadget oleh anak usia sekolah untuk literasi	PEMKAB BANYUMAS	Tetap

NO	Tujuan/ Sasaran	No	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab			Dampak		Rencana Tindak Pengendalian	SKPD	KETERANGAN
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
12	Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	21	Indek kedalaman Kemiskinan	Masih tingginya beban pengeluaran masyarakat miskin untuk pemenuhan kebutuhan dasar		Kepala Daerah	Belum optimalnya implementasi kebijakan terkait pemanfaatan satu data sasaran kemiskinan untuk pemberian bantuan layanan dasar	Internal	C	Masih sulitnya masyarakat miskin keluar dari garis kemiskinan	1. Pemda 2. OPD terkait 3. Masyarakat miskin	Pemetaan masyarakat miskin sebagai sasaran intervensi serta Koordinasi pelibatan seluruh stake holder dalam mendukung program kegiatan penanggulangan kemiskinan	PEMKAB BANYUMAS	Tetap
						Kepala Daerah	Belum optimalnya implementasi kebijakan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan layanan dasar masyarakat	Internal	C	Masih sulitnya masyarakat miskin keluar dari garis kemiskinan	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat		PEMKAB BANYUMAS	Tetap
				Terbatasnya akses masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan		Kepala Daerah	Kebijakan peningkatan kompetensi masyarakat belum tepat sasaran dan belum sesuai kebutuhan	Internal	C	Masih banyaknya masyaraiat dibawah garis kemiskinan	1. pemda 2. OPD 3. Stakeholder terkait 4. Masyarakat	Kebijakan program pelatihan tenaga kerja dan UMKM prioritas masyarakat miskin	PEMKAB BANYUMAS	Tetap
3	**Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah**													
13	Meningkatkan stabilitas keamanan wilayah	22	Angka Kriminalitas	Masih banyaknya pelanggaran hukum di masyarakat		Kepala Daerah	Kurangnya penegakan Perda	Internal	C	Munculnya kasus gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Kepala Daerah 2. OPD terkait 3. Masyarakat	Intensifikasi sosialisasi Perda	PEMKAB BANYUMAS	Tetap
14	Meningkatkan sarana dan prasarana wilayah	23	Indek daya saing infrastruktur	Belum meratanya pelayanan transportasi publikdi semua wilayah		Kepala Daerah	Belum ada Rencana Induk Jaringan Jalan	Internal	C	Masih adanya wilayah yang belum terlayani transportasi public	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat	Penyusunan Rencana Induk Jaringan Jalan	PEMKAB BANYUMAS	Tetap
				Ketersediaan infrastruktur wilayah belum merata		Kepala Daerah	Kebijakan prioritas pembangunan masih difokuskan di perkotaan	Internal	C	Pengembangan wilayah tidak merata	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat	Mitigasi ketahanan Infrastruktur	PEMKAB BANYUMAS	Tetap
												Kebijakan Pengawasan Pengendalian mutu infrastuktur		
15	Meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan menurunkan resiko bencana	24	Indeks Resiko Bencana IRB	Kurangnya ketahanan daerah terhadap risiko bencana		Kepala Daerah	Belum semua jenis bencana memiliki Dokumen rencana kontijensi	Internal	C	Potensi kerugian akibat bencana bertambah	1. Kepala Daerah 2. OPD terkait 3. Masyarakat	Penyusunan Dokumen rencana kontijensi untuk semua jenis bencana	PEMKAB BANYUMAS	Tetap
		25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH	Terjadinya pencemaran limbah B3		Kepala Daerah	Belum efektifnya kebijakan pengelolaan limbah B3	Internal	C	Kerusakan lingkungan hidup	1. Kepala Daerah 2. OPD terkait 3. Masyarakat	Koordinasi dan penguatan kelembagaan yang mengelola SDA	PEMKAB BANYUMAS	Tetap
16	Meningkatkan kapabilitas Riset dan Inovasi	26	Indeks Pilar kapabilitas inovasi pada IDSD	Belum terarahnya Pengembangan inovasi daerah		Kepala Daerah	Belum tersusunnya roadmap SIDa	Internal	C	Kurangnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat	Penyusunan roadmap SIDa	PEMKAB BANYUMAS	Tetap
				Belum terfasilitasinya layanan KI (Kekayaan Intelektual)		Kepala Daerah	Belum terbentuk Klinik Kekayaan Intelektual	Internal	C	Kekayaan intelektual masyrakat tidak berkembang	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat	Pembentukan Klinik Kekayaan Intelektual	PEMKAB BANYUMAS	Tetap
17	Mengoptimalkan Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah	27	Nilai Produk Domestik Regional Bruto PDRB	Peningkatan nilai tambah sektor unggulan melalui hilirisasi produk unggulan daerah belum memberikan multiplier effect dalam pengembangan pariwisata dan UMKM		Kepala Daerah	Belum adanya kebijakan hilirisasi produk unggulan daerah yang ditetapkan	Internal	C	Nilai PDRB sektor unggulan tidak meningkat	1. Kepala Daerah 2. OPD terkait 3. Masyarakat	Penetapan Produk Unggulan Daerah	PEMKAB BANYUMAS	Penambahan indikator PK dengan risiko dan RTP tetap
							Belum adanya kebijakan penetapan produk unggulan daerah	Internal	C	Nilai PDRB sektor unggulan tidak meningkat	1. Pemerintah daerah 2. OPD terkait 3. Industri kecil dan UMKM		PEMKAB BANYUMAS	
		28	Nilai PDRB Sektor Unggulan											
4	**Memperkuat Ketahanan Pangan**													
18	Meningkatkan ketersediaan pangan secara mandiri	29	Nilai aspek ketersediaan pangan dalam IKP	Alih fungsi lahan pertanian yang terus terjadi		Kepala Daerah	Kebijakan Perlindungan Lahan Pangan dan Pertanian berkelanjutan belum ditetapkan	Internal	C	Berkurangnya ketersediaan pangan hasil produksi pertanian, peternakan dan perikanan	1. Pemerintah 2. OPD terkait 3. Petani	Penetapan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan dan pertanian berkelanjutan (LP2B)	PEMKAB BANYUMAS	Tetap
				Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan daerah		Kepala Daerah	Belum adanya dokumen rencana pangan	Internal	C	tidak terpenuhinya cadangan pangan secara cukup dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan	1. Pemerintah 2. OPD 3. Petani 4. Masyarakat	Penyusunan dokumen rencana pangan cadangan pangan	PEMKAB BANYUMAS	Tetap
19	Meningkatkan keterjangkauan pangan	30	Nilai aspek keterjangkauan pangan dalam IKP	Masih adanya daerah rawan pangan		Kepala Daerah	Kurangnya sinkronisasi program dan kebijakan yang mengintervensi stakeholder terkait keterjangkauan pangan sesuai dengan kewenangan	Internal	C	tidak meratanya pangan dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan	1. Pemerintah daerah 2. OPD terkait 3. Petani 4. Masyarakat	Sinkronisasi program dan kebijakan terkait penanganan daerah rawan pangan sesuai pemetaan yang melibatkan stakeholder sesuai dengan kewenangan	PEMKAB BANYUMAS	Tetap
20	Mengoptimakan pemanfaatan pangan	31	Nilai aspek pemanfaatan pangan dalam IKP	Kurangnya minat masyarakat terhadap pola pangan yang ideal		Kepala Daerah	Belum adanya kebijakan yang mendorong diversifikasi dan keamanan pangan	Internal	C	Belum idealnya pola konsumsi pangan masyarakat	1. Kepala daerah 2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3. Petani 4. Masyarakat	Penyusunan kebijakan yang mendorong diversifikasi dan keamanan pangan	PEMKAB BANYUMAS	Tetap

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asekbang	
3	Kabag Hukum	
4	Ka. Bappedalitbang	

Pj. BUPATI BANYUMAS

HANUNG CAHYO SAPUTRO